

PENGARUH BELANJA DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN DIMODERASI BELANJA MODAL DI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Akhmad Ansar, Muhammad Hidayat, Fatmasari
Pascasarjana STIE NOBEL INDONESIA MAKASSAR

email : mangasihansar@yahoo.com, hidayat@stienobel-indonesia.ac.id, fatmasari@stienobel-indonesia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar (2) apakah belanja modal dapat memoderasi hubungan antar belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada bulan Juli sampai Agustus 2020. Populasi dalam penelitian adalah data pertumbuhan ekonomi, belanja daerah, dan belanja modal Kabupaten Kepulauan Selayar. Data tersebut merupakan data bulanan tiga tahun terakhir yakni 2017, 2018, dan 2019 yang dijadikan sampel. Pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Instrumen penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu dengan menggunakan pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengakses data yang tersedia dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variabel belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi senilai 82%. Variabel belanja daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga semakin besar belanja daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi (2) pengaruh belanja daerah apabila dimoderasi dengan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 34%, belanja modal menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi namun pengaruhnya tidak signifikan.

Kata Kunci: Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal

Abstract

This study aims to analyze (1) the effect of regional spending on economic growth in Selayar Islands Regency (2) whether capital expenditures can moderate the relationship between regional spending on economic growth in Selayar Islands Regency.

This study method using quantitative methods and conducted in Selayar Islands Regency from July to August 2020. The population in this study is data on economic growth, regional expenditure, and capital expenditure in Selayar Islands Regency. This data is the monthly data for the last three years, namely 2017, 2018, and 2019 which were sampled. Hypothesis testing uses multiple linear regression. The research instrument used in this data collection is by using data collection. Data collection is done by accessing the available data from the Regional Government of the Selayar Islands Regency.

The results show that (1) the regional expenditure variable has an effect on economic growth by 82%. Regional expenditure variable has a positive effect on economic growth so that the greater the regional expenditure in Selayar Islands Regency the greater the effect on economic growth (2) the effect of regional spending when moderated by capital expenditure on economic growth is 34%, capital expenditure becomes a mediation / intermediary in the relationship between regional spending on economic growth but the effect is not significant.

Keywords: Regional Expenditure, Economic Growth, Capital Expenditure

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi menandakan meningkatnya kapasitas produksi barang dan jasa dalam masyarakat yang dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, daya beli masyarakat juga akan turut meningkat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk menunjang produktivitasnya. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Menurut Laporan Perekonomian Indonesia Tahunan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015 menunjukkan angka 4,79% yang merupakan angka yang cukup rendah karena pada saat itu Indonesia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi yang rendah tersebut mengalami perbaikan pada tahun 2016 karena mengalami kenaikan dengan angka 5,02% meskipun perekonomian dunia melemah dan masih diliputi ketidakpastian. Namun, kondisi ekonomi ini dapat ditingkatkan pada tahun 2016 yang dipicu oleh faktor-faktor eksternal seperti melambatnya pertumbuhan ekonomi negara *emerging market* seperti China dan India yang menimbulkan konsekuensi berakhirnya era harga komoditas yang tinggi, menurunkan *terms of trade* Indonesia dan pada akhirnya menekan kinerja ekspor komoditas primer. Selain itu, membaiknya kinerja perekonomian Amerika Serikat mendorong otoritas moneter untuk mulai melakukan pengurangan stimulus moneter sehingga secara berangsur-angsur mengurangi pasokan likuiditas ke negara *emerging market*, termasuk Indonesia. Perekonomian Indonesia tahun 2017 tumbuh sebesar 5,07%, melambat dibandingkan dengan 5,02% pada tahun 2016. Dari sisi eksternal, perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor yang menurun akibat turunnya permintaan terutama dari *emerging markets* (EM) dan harga komoditas global, serta adanya kebijakan pembatasan ekspor mineral mentah. Dari sisi permintaan domestik, perlambatan tersebut didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah yang melambat sebagai akibat program penghematan guna menjaga sustainabilitas fiskal. Untuk tahun 2018, pertumbuhan ekonomi sudah mengalami perbaikan dari 5,07% pada 2017 menjadi 5,17%. Namun, yang dapat dicatat adalah dibandingkan dengan negara-negara lain dengan basis komoditas, pertumbuhan tersebut masih relatif tinggi.

Dalam upaya pencapaian tujuan nasional, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur utama sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai peranan yang sangat strategis. Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan yang amat kompleks menurut Nugraha (2012) dibutuhkan Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional. Menurut Suropto dalam Kadarisman (2012) Profesionalisme aparatur akan meningkat seiring dengan tingkat kompetensinya. Agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ASN, ASN bekerja berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin serta kondisi kecacatan atau lebih dikenal dengan merit sistem. Dalam sistem tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), terdapat perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel,

dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kondisi dimana penentuan pengisi jabatan struktural tidak lagi menjadi sesuatu yang perlu untuk dipertimbangan dengan baik karena akan memberi dampak terhadap kemajuan organisasi itu sendiri, dimana menurut Murtiadi (2012) manajemen SDM memegang peranan yang sangat penting. Sejalan dengan itu dari amanat UU ASN dalam Pasal 25 dan 26 menunjukkan bahwa pembinaan karir (*career development*) ASN merupakan bagian integral dari Manajemen ASN. Karir adalah suatu pencapaian seorang ASN yang didapatkan selama masa pengabdianya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi, karir ASN tersebut merupakan tahapan perkembangan pencapaian posisi jabatan yang terendah hingga yang tertinggi selama seseorang tersebut menjadi ASN. Pembinaan karir ASN di Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu ASN, yang dicapai dalam rangka perencanaan karir yang diinginkan. Karir ASN di sini merupakan suatu urutan promosi atau pemindahan ke jabatan-jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab, sehingga karir mencerminkan perkembangan ASN secara individu dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja dalam organisasi publik yang bersangkutan. Sasaran karir ASN adalah posisi atau jabatan di waktu yang akan datang, yaitu ASN berjuang untuk mencapainya sebagai bagian dari karirnya.

Tujuan dari pembinaan karir ASN tersebut adalah untuk menyesuaikan kebutuhan dan tujuan aparatur yang ada, dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mengetahui prospek karir ASN sesuai UU ASN, maka harus diketahui jenis-jenis dan tingkatan posisi jabatan ASN yang ada sesuai ketentuan yang diatur di dalam UU ASN tersebut. Berikut persyaratan apa yang harus dipenuhi, dan tahapan apa saja yang harus dilalui agar ASN bisa mencapai posisi-posisi jabatan yang ada tersebut. ASN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana dalam penyelenggaraan tugas tugas pemerintahan di Kabupaten/kota, menurut Kadarisman (2013) adalah sumber daya aparatur yang bertugas menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, dan memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan, selain dari pada itu ASN juga berperan memberikan informasi-informasi yang jelas kepada publik atau masyarakat secara profesional dan berkualitas khususnya pada pelaku usaha perikanan.

Adapun implementasi atas kebijakan tersebut, diharapkan dapat mewujudkan dan menciptakan ASN di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya dalam organisasi perangkat daerah Dinas Kelautan dan perikanan sebagai aparatur birokrasi yang berkualitas, yang memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

Kondisi kinerja pembangunan perkembangan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar kurun waktu tahun 2015-2019 relatif berfluktuasi, namun secara umum menunjukkan perkembangan yang meningkat yaitu rata-rata 8%. Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015-2019 berturut-turut adalah 8,81%, 7,35%, 7,61%, 8,77% dan 7,66%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 2015-2019 adalah 7,54%, 7,19%, 7,42%, 7,21%, 7,07% dan 6,92%. Hal ini berarti, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar masih di atas angka Provinsi Sulawesi Selatan, demikian juga pertumbuhan ekonomi secara nasional

masih jauh di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu rata-rata 8%.

Pengeluaran pemerintah atau Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2015-2017 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya dan mengalami penurunan ditahun 2018 kemudian pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan.

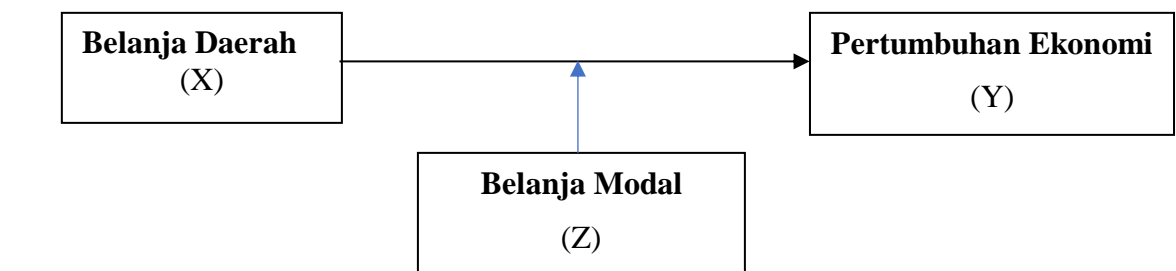
Peningkatan belanja tersebut diharapkan mampu menggiatkan pertumbuhan perekonomian sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Keynes. Namun pada kenyataannya, peningkatan belanja pemerintah tidaklah selalu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini terlihat ketika terjadinya peningkatan belanja Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2015-2016, namun pertumbuhan ekonomi tahun 2015-2016 mengalami perlambatan.

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa belanja modal masih memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Namun, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal rasio keserasian belanja modal diposisikan sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah proporsi alokasi belanja modal terhadap total realisasi belanja akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Dimoderasi Belanja Modal di Kabupaten Kepulauan Selayar”**.

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah belanja daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar?, 2) Apakah belanja modal dapat memoderasi hubungan antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar?.

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar, 2) Untuk mengetahui apakah belanja modal dapat memoderasi hubungan antara belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka konseptual penelitian adalah :



Gambar 1. Gambar Kerangka Pemikiran

Melalui gambar kerangka konsep di atas maka akan terdapat dua hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu: 1) **Belanja Daerah (X)** berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi, 2) **Belanja Modal (Z)** berpengaruh sebagai mediasi antar belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, kuisioner bahkan pengamatan yang telah dituangkan dalam catatan (transkrip).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena data penelitian yang digunakan berupa angka-angka (Sekaran dan Bougie, 2013:3). Penelitian ini menguji hipotesis untuk mengetahui apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel pemoderasi.

Data yang digunakan pada penelitian adalah data belanja daerah dan belanja modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan dengan rentang waktu pengamatan yaitu tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019 yang diurai per bulan setiap tahun anggarannya.

Untuk data pada variabel dependen (Belanja Daerah) dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

PERIODE	2017		2018		2019	
	S/D BULAN	PERBULAN	S/D BULAN	PERBULAN	S/D BULAN	PERBULAN
Januari	15.907.285.505,20	15.907.285.505,20	13.574.542.940,00	13.574.542.940,00	22.235.616.086,00	22.235.616.086,00
Februari	39.834.777.280,20	23.927.491.775,00	41.038.120.516,00	27.463.577.576,00	44.669.483.932,00	22.433.867.846,00
Maret	73.866.906.699,20	34.032.129.419,00	73.568.944.716,00	32.530.824.200,00	77.501.052.360,00	32.831.568.428,00
April	115.419.382.902,20	41.552.476.203,00	119.412.763.228,00	45.843.818.512,00	114.823.955.930,00	37.322.903.570,00
Mei	164.127.996.736,40	48.708.613.834,20	186.709.794.936,00	67.297.031.708,00	229.315.232.862,00	114.491.276.932,00
Juni	228.308.430.207,00	64.180.433.470,60	248.374.735.036,00	61.664.940.100,00	252.893.872.770,00	23.578.639.908,00
Juli	303.490.417.279,60	75.181.987.072,60	349.137.947.865,00	100.763.212.829,00	343.236.725.752,00	90.342.852.982,00
Agustus	365.313.299.484,40	61.822.882.204,80	435.641.322.293,00	86.503.374.428,00	415.660.706.458,00	72.423.980.706,00
September	408.874.348.977,00	43.561.049.492,60	500.281.525.248,55	64.640.202.955,55	483.976.981.233,00	68.316.274.775,00
Oktober	476.210.470.328,00	67.336.121.351,00	586.877.357.604,55	86.595.832.356,00	569.560.138.930,00	85.583.157.697,00
November	574.684.109.847,60	98.473.639.519,60	669.789.851.824,55	82.912.494.220,00	657.219.670.761,00	87.659.531.831,00
Desember	743.583.318.347,60	168.899.208.500,00	891.981.507.754,43	222.191.655.929,88	864.158.937.746,08	206.939.266.985,08
TOTAL BELANJA	865.699.780.879,00	865.699.780.879,00	891.981.507.754,43	891.981.507.754,43	864.158.937.746,08	864.158.937.746,08

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Sedangkan pada variabel moderasi yaitu Belanja Modal (BM) tersaji data sebagai berikut:

PERIODE	2017		2018		2019	
	S/D BULAN	PERBULAN	S/D BULAN	PERBULAN	S/D BULAN	PERBULAN
Januari	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	84.656.300,00	84.656.300,00
Februari	60.561.500,00	60.561.500,00	175.804.099,00	174.804.099,00	405.407.700,00	320.751.400,00
Maret	5.056.665.320,00	4.996.103.820,00	3.435.524.946,00	3.259.720.847,00	2.238.738.342,00	1.833.330.642,00
April	15.034.047.330,00	9.977.382.010,00	6.903.668.905,00	3.468.143.959,00	2.976.588.182,00	737.849.840,00
Mei	20.356.407.379,00	5.322.360.049,00	15.525.763.229,00	8.622.094.324,00	6.667.374.509,00	3.690.786.327,00
Juni	30.101.037.353,00	9.744.629.974,00	19.610.123.923,00	4.084.360.694,00	11.773.808.268,00	5.106.433.759,00
Juli	50.397.613.422,00	20.296.576.069,00	60.015.249.526,00	40.405.125.603,00	37.386.253.324,00	25.612.445.056,00
Agustus	60.366.626.187,00	9.969.012.765,00	85.983.518.984,00	25.968.269.458,00	50.767.717.664,00	13.381.464.340,00
September	69.590.060.623,00	9.223.434.436,00	103.107.898.497,00	17.124.379.513,00	63.836.802.822,00	13.069.085.158,00
Oktober	93.755.326.526,00	24.165.265.903,00	135.944.016.726,00	32.836.118.229,00	89.008.105.642,00	25.171.302.820,00
November	121.972.115.084,00	28.216.788.558,00	168.756.649.956,00	32.812.633.230,00	105.041.672.325,00	16.033.566.683,00
Desember	173.007.970.509,00	51.035.855.425,00	262.281.755.384,00	93.525.105.428,00	178.990.804.901,00	73.949.132.576,00
BELANJA MODAL	173.007.970.509,00	173.007.970.509,00	262.281.755.384,00	262.281.755.384,00	178.990.804.901,00	178.990.804.901,00
TOTAL BELANJA	865.699.780.879,00	865.699.780.879,00	891.981.507.754,43	891.981.507.754,43	864.158.937.746,08	864.158.937.746,08

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis I (Pengaruh Belanja Daerah (X) secara parsial terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y))

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.664	.216		35.517	.000		
X1	.004	.003	.287	1.747	.090	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Y

Tabel diatas menunjukkan bahwa Belanja Daerah dan Belanja Modal memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 yaitu sebesar 1,00. Hal ini menunjukkan bahwa indikasi keberadaan multikolinieritas pada penelitian tidak terjadi multikolinieritas, maka hubungan antar variabel independen dapat diterima.

Model regresi I (pengaruh Belanja Daerah (BD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi), Nilai signifikansi Belanja Daerah (BD) sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien bernilai 0,003 dengan signifikansi sebesar 0,090 sehingga hipotesis 1 (H1) diterima dalam artian secara parsial Belanja Daerah (BD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil uji t hitung dengan signifikansi variabel pada regresi I dapat dilihat dibawah ini :

Tabel Uji Signifikansi Regresi I
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.664	.216		35.517	.000
X1	.004	.003	.287	1.747	.090

a. Dependent Variable: Y

Model regresi II (pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap Pertumbuhan ekonomi), Nilai signifikansi Belanja Modal (BM) sebesar 0,00 atau lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien bernilai 0,008 sehingga hipotesis 2 (H2) diterima dalam artian secara

parsial Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil uji t hitung dengan signifikansi variabel pada regresi II dapat dilihat dibawah ini :

Tabel Uji Signifikansi Regresi II
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	7.694	.124		62.154	.000
1 X2	.008	.002	.581	4.163	.000

a. Dependent Variable: Y

Hipotesis II (Pengaruh Belanja Daerah (X), terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) dengan dimediasi Belanja Modal (Z))

Berdasarkan uji regresi model II dan III diketahui bahwa Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap BM sementara BM juga berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mengacu pada model regresi dengan melibatkan variabel mediasi (model II) dan tanpa melibatkan variabel mediasi (model I) diketahui bahwa koefisien Belanja Daerah (BD) pada model I (0,004) hampir sama dengan nilai koefisien Belanja Modal pada model II (0,008) sehingga hipotesis yang menyatakan tersebut ditolak dalam artian bahwa variabel BM tidak memediasi hubungan antara Belanja Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi.

Pembahasan

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Belanja Daerah (BM) berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan arah yang positif dimana salah satu pemicunya adalah pendapatan daerah. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai pendapatan daerah tersebut maka akan menyebabkan peningkatan pula pada capaian pertumbuhan ekonomi. Sumber-sumber belanja daerah yang tersedia sedemikian rupa yang fleksibel dari segi pemanfaatannya kedepan akan menyebabkan daerah lebih leluasa dalam merencanakan alokasi anggaran belanja untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonominya yang antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana dasar yang berperan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang optimal, adanya pengaruh Belanja Daerah atau Nilai R Square pada persamaan regresi pertama sebesar 0,082 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Belanja Daerah berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan ekonomi sebesar 82% Kesimpulan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh erdi adyatma dkk (2015). Adapun penelitian dengan kesimpulan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal. Arah koefisien regresi bertanda positif, berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal.

Salah satu belanja daerah seperti belanja pada alokasi DAU dan PAD berperan dalam mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal dengan arah yang positif. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai ketiga jenis pendapatan daerah tersebut maka akan menyebabkan peningkatan pula pada alokasi anggaran belanja modalnya. Sebagaimana *current spending* dipengaruhi oleh *current resources*, meningkatnya pendapatan daerah dalam hal ini PAD, DAU akan meningkatkan pula semua jenis alokasi anggaran belanjanya termasuk salah satunya adalah belanja modal. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013).

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang di Moderasi Belanja Modal

Belanja modal menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara Belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai regresi ketiga (X_1, X_2 ke Y) sebesar 0,347 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Belanja Daerah berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan ini berseberangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anasmen (2009) dan Hendarmin (2012) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang mendukung temuan Sodik dilakukan oleh Kurniawan et al. (2010) dengan mengambil studi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat untuk TA 2004 - 2010 yang menemukan bahwa alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lainnya yang mengungkap adanya pengaruh dan hubungan positif antara belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi dilakukan oleh Rokhmawati (2009) dengan studi kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur untuk TA 2003-2006.

Pertumbuhan ekonomi terwujud dengan cara meningkatkan dan menciptakan aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat sehingga secara makro terjadi peningkatan jumlah output barang dan/atau jasa pada daerah yang bersangkutan yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana semakin besar nilai uang yang dibelanjakan oleh suatu pemerintah daerah melalui pos belanjanya baik belanja modal ataupun jenis belanja lainnya secara langsung ataupun tidak langsung akan meningkatkan dan menciptakan aktivitas ekonomi baru dan memberikan efek multiplier yang mengarahkan pada meningkatnya PDRB dengan syarat pembelanjaan tersebut dilakukan pada wilayah daerahnya sendiri.

Pada kasus penelitian ini belanja modal memediasi hubungan antara Belanja Daerah dengan pertumbuhan ekonomi karena rata-rata alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar hanya Lebih dari 45% dengan sisanya sebesar 55% lebih dialokasikan pada pos belanja selain belanja modal. Terlebih lagi berdasarkan analisa Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, menyatakan bahwa perilaku boros pemerintah Kabupaten yang mengurus separuh lebih anggarannya hanya untuk membiayai belanja pegawai mengantarkan mereka menuju jurang kebangkrutan. Bengkaknya belanja pegawai ini disebabkan oleh : 1) Pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta adanya gaji ke-13 dan Ke 14. 2) Pembiaran

terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 3) Jumlah organisasi yang ada di kabupaten/ kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah (Birokrasi Tambun, 2012).

Selain itu, berdasarkan data APBD dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, terlihat banyak daerah dengan porsi belanja pegawai di atas 50 persen.

Rendahnya porsi alokasi belanja modal disebabkan tingginya porsi belanja pegawai yang tidak terkait langsung dengan pertumbuhan ekonomi inilah yang mungkin menjadi salah satu penyebab variabel belanja modal tidak mampu menjadi mesin penggerak menuju tercapainya pertumbuhan ekonomi yang optimal meskipun nilai pendapatan daerah cukup tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Objek penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1) Variabel Belanja Daerah berpengaruh terhadap variabel Pertumbuhan ekonomi senilai 0,082 atau sebesar 82%. Variabel Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, semakin besar belanja daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar maka semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. 2) Pengaruh Variabel Belanja Daerah apabila dimoderasi dengan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,347. Belanja modal menjadi mediasi/perantara dalam hubungan antara Belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi namun pengaruhnya tidak signifikan.

Saran

Adapun saran yang dapat diajukan oleh peneliti atas penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar menambah jumlah variabel independen yang digunakan sebab pertumbuhan ekonomi dipengaruhi pula oleh faktor-faktor lain seperti kemandirian keuangan daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan sebagainya. 2) Menggunakan periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga hasil penelitian lebih memberikan gambaran yang komprehensif atas kondisi pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasmen. 2009. *Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat: 2000 – 2006*. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.
- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Baron, Reuben M. dan David A. Kenny. 1986. The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. *Journal of Personality and Social Psychology*, (Online), Vol. 51, No. 6, (<http://www.sesp.org/files/>, diakses 2 Februari 2017).

- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2015. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2015*.
- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2016. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2016*.
- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2017. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2017*.
- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2018. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2018*.
- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2019. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2019*.
- Badan Pusat Statistik kab. Kepulauan Selayar, 2020. *Kepulauan Selayar Dalam Angka 2020*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bati. 2009. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara)*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Berutu, Reza Monanda. 2009. *Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Dairi*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. 2015. *Sulawesi Selatan dalam Angka 2015*. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. 2016. *Sulawesi Selatan dalam Angka 2016*. Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Butar-Butar, Candra P. 2008. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pematang Siantar*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2012. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2011*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2013. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2012*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2014. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2013*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2015. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2014*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter. 2016. *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2015*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan. 2012. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2011*. Makassar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua.
- Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan. 2013. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2012*. Makassar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua.
- Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan. 2014. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2013*. Makassar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua.

- Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan. 2015. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2014*. Makassar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua.
- Divisi Asesmen Ekonomi dan Keuangan. 2016. *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan IV 2015*. Makassar: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah I – Sulawesi Maluku Papua.
- Dwirandra, A.A.N.B. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Keserasian Belanja Daerah sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 8, No. 2: 66-74.
- Eliza, Yulina. 2015. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SEMA), Universitas Negeri Padang, Padang, 10 Oktober.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N. 2004. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. Columbus: The McGraw-Hill Education.
- Gujarati, Damodar N. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi Ketiga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hakim, Lukman. 2014. *Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa dan Bali)*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja, dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Eksos*, Vol. 8, No. 3: 144-155.
- Hendriwiyanto, Guntur. 2014. *Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi*. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hutabarat, Heston Pero. 2014. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- JPNN.com. 12 November 2014. *Daya Dorong APBN Rendah – Realisasi Belanja Pegawai Tertinggi* (Online), (<http://www.jpnn.com/news/realisasi-belanja-pegawai-tertinggi>, diakses 6 Februari 2017).
- Kawa, Erlangga Pati. 2011. *Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pasca Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Kembauw, Esther, Lexy J. Sinay, Aphrodite M. Sahunilawane. 2015. *Pembangunan Perekonomian Maluku*. Yogyakarta: Deepublish.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2008. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran*. Jakarta: Sekretariat Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Miller, Roger LeRoy dan Robert W. Pulsinelli. 1986. *Macroeconomics*. New York: Harper & Row.
- Muis, Noni Hilwa. 2012. *Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara*. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2006. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran*. 2011. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016*. 2015. Makassar: Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach Sixth Edition*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Silalahi, Fauzan Afmirzal. 2006. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Terhadap PDRB di Kota Medan*. Skripsi. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Soepangat, Edi dan Haposan Lumban Gaol. 1991. *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukirno, Sadono. 1996. *Makro Ekonomi Edisi Ke – 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2007. *Makroekonomi Modern Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Uhise, Stepvani. 2013. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 4: 1677-1686.
- Utami, Diah. 2007. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1975-2004*. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. 2003. Jakarta: Departemen Keuangan Republik